

PENELITIAN MANDIRI

**PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG SUATU PENDEKATAN
PENGELUARAN BIAYA INVESTASI DAN BIAYA PEMBANGUNAN**

OLEH

Dr. M. Achmad Subing, SE.,M.Si
0005055901



Universitas Bandar Lampung
2019



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKUNTANSI STATUS TERAKREDITASI "B" No: 392/SK/BAN-PT/Akred/S/O/2014
MANAJEMEN STATUS TERAKREDITASI "A" No: 2192/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018

Jl. Z.A. Pagar Alam No. 26 Lb. Ratu, Bandar Lampung, Telp. : 701979 – 701463. Fax. 701467

SURAT TUGAS	Nomor Dokumen	FM.SD.FEB.007
	Nomor Revisi	-
	Tgl. Berlaku	Maret 2013
	Nomor Surat	13D/ST/FEB-UBL/IX/2019
	Halaman	1

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung dengan ini memberi tugas kepada :

Nama : **Dr. M. Achmad Subing, S.E., M.Si.**
Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung

Untuk melaksanakan penelitian dengan judul **"Pembangunan Daerah Lampung Suatu Pendekatan Pengeluaran Biaya Investasi dan Biaya Pembangunan"**. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan September 2019 s.d.Desember 2019.

Demikian surat tugas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 6 September 2019

Dekan,

UBL
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS
Dr. Andala Rama Putra Barusman, S.E., M.A.Ec



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(LPPM)
Jl. Z.A. Pagar Alam No : 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung Tlp: 701979
E-mail : lppm@ubl.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 037 / S.Ket / LPPM-UBL / II / 2020

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bandar Lampung dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama	: Dr. M. Achmad Subing., SE., M.Si
2. NIDN	: 0005055901
3. Tempat, tanggal lahir	: Sukadana, 05 Mei 1959
4. Pangkat, golongan ruang, TMT	: Penata Tingkat I, III/D, 01 Oktober 1998
5. Jabatan, TMT	: Lektor 01 Januari 2001.
6. Bidang Ilmu	: Manajemen
7. Jurusan / Program Studi	: Manajemen
8. Unit Kerja	: Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung

Telah melaksanakan Penelitian dengan Judul

**:"Pembangunan Daerah Lampung suatu pendekatan
pengeluaran biaya Investasi dan biaya
peembangunan"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 05 Februari 2020
Kepala LPPM-UBL

Dr. Hendri Dunan, SE., M.M

Tembusan:

1. Rektor UBL (Sebagai Laporan)
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

ABSTRAK

Dr. H. M. Achmad Subing, SE., M.Si dan Firdaus, SE melakukan penelitian dengan judul; **Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lampung Suatu Pendekatan Pola Perencanaan Investasi Dan Sumber Biaya Pembangunan**

Adapun sumber-sumber pembiayaan pembangunan di Daerah Lampung secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu dari pemerintah dan dari masyarakat. Sumber dana pemerintah meliputi bantuan pemerintah pusat, terdiri dari proyek sektoral dan proyek Inpres (Instruksi Presiden) serta dari pemerintah daerah, terdiri dari subsidi-subsidi dan pendapatan asli. Sedangkan sumber dana dari masyarakat meliputi dana dari perusahaan-perusahaan . dan dana dari perseorangan.

Permasalahan dalam tulisan ini adalah: "Seberapa besar kebutuhan investasi dan sumber biaya pembangunan melalui pendekatan pola perencanaan kebutuhan investasi dan sumber dana pembangunan yang perlu diusahakan penerimanya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah Lampung.

Alat analisis yang dipakai adalah analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Dalam analisis kuantitatif digunakan analisis IGOR (Incremental Capital Output Ratio) guna mengetahui berapa besar investasi yang harus ditanamkan untuk menghasilkan sejumlah output. Selain itu digunakan juga analisis elastisitas untuk mengetahui besarnya dana sektoral, Inpres, subsidi pembangunan dan subsidi rutin serta hubungannya dengan anggaran nasional. Analisis trend dipakai untuk mengetahui besarnya pendapatan asli daerah dan besarnya biaya rutin daerah pada masa yang akan datang. Analisis tabel digunakan juga sebagai penunjang analisis di atas

Berdasarkan hasil perhitungan di dapat nilai ICOR = 2,23 yang berarti untuk menghasilkan tambahan output sebesar Rp 1,00 dibutuhkan investasi masyarakat sebesar Rp 2.,23. Dana sektoral mempunyai hubungan yang kuat dan searah dengan dana pembangunan nasional yang ditunjukkan oleh tingkat

elastisitas yang elastis sebesar 3,29. Terhadap dana Inpres, dana pembangunan juga mempunyai hubungan yang kuat dan searah, dengan nilai elastisitasnya sebesar 1,37. Subsidi pembangunan mempunyai hubungan yang searah tetapi lemah dengan dana pembangunan nasional dengan nilai yang inelastis sebesar 0,81., sedangkan subsidi rutin mempunyai hubungan yang lemah dan searah dengan dana rutin nasional yang ditunjukkan oleh tingkat elastisitas yang inelastis sebesar 0,77. Pendapatan_asli meningkat rata-rata sebesar 8,32 persen per. tahun, belanja rutin meningkat. rata-rata sebesar 7,53 persen per tahun. Secara keseluruhan, dana sektoral lebih banyak berperan dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah Lampung, yaitu rata-rata sebesar 63,93 persen per tahun dari keseluruhan dana pembangunan, sedangkan dana proyek Inpres rata-rata sebesar 15,91 persen per tahun dan dana APBD rata rata sebesar 20,15 persen per tahun. Dengan demikian berarti dana sektoral masih sangat dominan peranannya, tetapi dana APBD mempunyai peranan yang lebih besar daripada dana Inpres.

Kata Kunci :

Pertumbuhan Ekonomi, Perencanaan Investasi, Biaya Pembangunan

KATA PENGANTAR

Dr. H. M. Achmad Subing, SE, M.Si dan Firdaus, SE mempersembahkan sebuah penelitian dengan judul *Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lampung : Suatu Pendekatan Terhadap Pola Perencanaan Kebutuhan Investasi dan Sumber Biaya Pembangunan*.

Perhatian kepada pembangunan daerah sangat besar. Hal ini tercermin semakin meningkatnya dana serta usaha-usaha pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Perhatian besar ini menimbulkan pemikiran perencanaan pembangunan daerah guna membantu pemerintah dalam menganalisis perencanaan pembangunan daerah. Begitu pula dengan daerah Lampung tidak luput dari kegiatan-kegiatan pembangunan guna peningkatan pendapatan daerah dari pembagian hasil-hasil pembangunan yang lebih merata. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mencoba memberikan sumbangan pemikiran dalam mencapai tujuan-tujuan dimaksud.

Dalam penulisan penelitian ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada;

1. Prof. Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, SE., MBA selaku rektor Universitas Bandar Lampung atas bantuannya .
2. Dr. Andala Rema Putra, SE, M.Sc selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung atas bimbinganya,
3. Teman-Teman di Universitas Bandar Lampung yang telah mengarahkan penulis agar penelitian ini dapat diselesaikan
4. Kepala Biro Pusat Statistik Provinsi Lampung yang telah memberikan data kepada penulis.

Segala usaha telah penulis lakukan dalam upaya penyempurnaan penulisan ini, namun kesempurnaan yang abadi hanya milik Allah SWT, oleh karena itu kekurangan yang terjadi dalam penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Bandar Lampung, Desember 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Permasalahan	4
1.3	Tujuan Penulisan	6

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Pengertian Pembangunan Ekonomi	7
2.2	Tujuan Pembangunan Ekonomi	8
2.3	Hipotesis	10

III. GAMBARAN UMUM DAERAH LAMPUNG

3.1	Potensi Wilayah	11
3.1.1	Kondisi Wilayah	11
3.1.2	Potensi Wilayah	12
3.2	Penduduk	13
3.3	Struktur Perekonomian Daerah Lampung	14
3.4	Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lampung	17
3.5	Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Lampung	18
3.5.1	Investasi Masyarakat Daerah Lampung	18
3.5.2	Dana Pembiayaan Pembangunan dari Pemerintah Pusat	19
3.5.3	Dana Pembiayaan Pembangunan dari Daerah Lampung	20

IV. HASIL PERHITUNGAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Perhitungan	11
4.1.1	Perhitungan Investasi	11
4.1.2	Perhitungan Dana Sektoral	12
4.1.3	Perhitungan Dana Proyek Inpres	13
4.1.4	Perhitungan Subsidi Pembangunan	14
4.1.5	Perhitungan Subsidi Ruitn	23
4.1.6	Perhitungan Pendapatan Asli Daerah Lampung	23
4.1.7	Perhitungan Belanja Rutin Daerah Lampung	23
4.2	Pembahasan	18

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	1
5.2 Saran	4

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diketahui setiap negara mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam proses pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut biasanya dibuatkan tujuan antara, sehingga tujuan akhirnya dapat tercapai dengan baik. Berhasilnya pembangunan suatu negara tergantung pada partisipasi rakyat serta sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin seluruh rakyat serta penyelenggara negara yang bersangkutan.

Sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara, kebijaksanaan pembangunan Indonesia adalah berdasarkan Trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Kesemuanya ini ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat serta untuk meletakkan landasan yang kuat bagi tahap pembangunan berikutnya.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka Panjang (Sadono Sukirno, 1985, 13). Berdasarkan pengertian di atas, pembangunan mengandung arti: suatu proses yaitu suatu perubahan yang terus-menerus, usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan usaha tersebut harus berlangsung dalam jangka Panjang.

Selain itu tujuan pembangunan ekonomi adalah di samping menaikkan pendapatan nasional riil juga meningkatkan produktivitas (Irawan dan Suparmoko, 1982;19). Pembangunan ekonomi menunjukkan perubahan-perubahan dalam struktur output maupun alokasi input pada berbagai sektor ekonomi. Jadi pada dasarnya pembangunan selalu diikuti oleh pertumbuhan.

Pembangunan ekonomi dapat dijadikan tolak ukur bagi kemajuan taraf hidup suatu bangsa, karena pembangunan ekonomi bukan saja harus mengatasi hambatan-hambatan yang bersifat ekonomi, tetapi juga hambatan-hambatan yang bersifat sosial, politik dan kebudayaan. (Sadono Sukirno, 1985:150).

Pembangunan dan pertumbuhan yang tinggi dapat merupakan suatu jalan menuju perbaikan taraf kesejahteraan penduduk yang lebih merata. Dalam hal ini telah ditetapkan delapan jalur pemerataan dalam usaha untuk lebih menunjukkan segi pemerataan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Adapun delapan jalur pemerataan itu adalah :

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan
3. Pemerataan pembagian pendapatan
4. Pemerataan kesempatan kerja
5. Pemerataan kesempatan berusaha
6. Pemerataan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita
7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air
8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Pembangunan nasional erat hubungannya dengan pembangunan suatu daerah, dimana pembangunan daerah turut menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Sedangkan berhasilnya suatu pembangunan daerah tergantung pada kondisi, potensi dan aspirasi daerah yang bersangkutan.

Adapun tujuan pembangunan daerah adalah sebagai berikut : (i) Memanfaatkan potensi yang ada di setiap daerah untuk mengembangkan daerah yang bersangkutan, (ii) Mengusahakan agar daerah-daerah yang secara relatif masih terbelakang dapat berkembang dengan laju yang lebih cepat daripada daerah-daerah lainnya, sehingga dapat dikurangi kesenjangan yang menyolok dalam tingkat kemajuan antar daerah dan pendapatan antar golongan masyarakat di dalam masing-masing daerah agar tercapai pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya secara regional, (iii) Mengusahakan agar daerah-daerah yang masih terbelakang makin lama makin besar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan nasional (Repelita IV, buku III, 1984:345).

Sebagaimana diketahui sebagian besar hasil Daerah Lampung adalah bersumber dari sektor primer. Meskipun pemerintah pusat sedang giat-giatnya melaksanakan

industrialisasi namun bukan berarti sektor pertanian itu dilupakan. Daerah Lampung telah lama dikenal sebagai daerah penghasil komoditi-komoditi penting ekspor non migas, seperti kopi, lada, karet, cengkeh serta komoditi-komoditi penting lainnya. Selain itu Daerah Lampung mempunyai potensi yang cukup besar untuk mengembangkan industri dan jasa-jasa, hal ini dikarenakan posisi geografisnya yang merupakan pintu gerbang antara pulau Sumatera dan pulau Jawa. Letak yang dekat dengan ibu kota negara dimana sebagian besar transaksi dilaksanakan serta ditunjang dengan hubungan yang semakin lancar menyebabkan Daerah Lampung banyak diminati oleh investor-investor untuk turut menanamkan modalnya.

Secara rata-rata laju pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi di Daerah Lampung memberikan gambaran cukup menggembirakan (Tabel 1). Selama periode tahun 1985 sampai dengan tahun 1989 sektor pertanian meningkat dengan rata-rata 6,10% per tahun. Faktor industri meningkat sebesar 14,57% per tahun, sektor sewa rumah meningkat sebesar 6,01% per tahun dan sector jasa-jasa meningkat sebesar 7,25% pertahun. Selain itu terdapat sektor-sektor yang memberikan sumbangan relatif kecil terhadap output daerah tetapi mempunyai perkembangan yang cukup tinggi, yaitu sektor bank dan Lembaga keuangan lainnya sebesar 18,59% pertahun serta sektor listrik, gas dan air minum 14,44% pertahun.

Dengan laju pertumbuhan di atas terlihat bahwa selain sektor sewa rumah, sektor pertanian mengalami peningkatan yang terkecil dibandingkan sektor-sektor lainnya, sedangkan sektor yang mengalami peningkatan yang cukup tinggi adalah sektor bank dan lembaga keuangan lainnya, sektor listrik, gas dan air minum serta sektor industri.

Selain menunjukkan peningkatan pendapatan regional secara keseluruhan, berikut ini dapat dilihat juga perkembangan penduduk Lampung guna mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan pendapatan Daerah Lampung.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Daerah Lampung Tahun 2008 - 2018

Tahun	Jumlah Penduduk	Persentase
2008	4.000.336	0,90
2009	4.624.785	2,03
2010	4.760.657	2,04
2011	4.858.026	2,00
2012	4.909.106	1,89
2013	4.995.000	3,00
2014	4.139.680	1,64
2015	4.684.920	1,23
2016	4.721.604	1,17
2017	4.786.924	1,72
2018	4.864.230	1,62
Rata-Rata	4.667.752	1,63

Sumber : *Badan Statistik Lampung, 20184*

Pada tahun 2013 penduduk Lampung mengalami peningkatan yang tertinggi sebesar 3,00 Peningkatan ini dikarenakan banyaknya penduduk yang masuk ke Daerah Lampung terutama dari pulau Jawa. Pada tahun-tahun selanjutnya 860 pertumbuhan penduduk jauh lebih kecil dengan tingkat yang terendah pada tahun 2008 sebesar 0,90 selanjutnya mengalami peningkatan kembali.

Keadaan yang demikian adalah suatu hal yang perlu dihindarkan karena dapat menyebabkan berkurangnya kesejahteraan masyarakat. Pendapatan per kapita itu sama dengan pendapatan rata-rata penduduk, berarti tingginya laju pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi sehingga pendapatan per kapita Daerah Lampung menjadi lebih kecil

1.2 Permasalahan

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pembangunan, sedangkan pembangunan itu sendiri memerlukan dana yang dapat diinvestasikan. Peningkatan investasi berkaitan erat dengan suatu pengelolaan dan perencanaan besarnya dana yang dibutuhkan. Penyusunan perencanaan kebutuhan investasi dan sumber biaya pembangunan merupakan salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyusunan perencanaan secara keseluruhan. Dalam penyusunan perencanaan ini pada dasarnya dibutuhkan suatu pola perencanaan kebutuhan

investasi dan sumber biaya pembangunan secara menyeluruh sehingga dapat menopang kemampuan penyediaan sumber pembiayaan atau dana untuk diinvestasikan guna mencapai laju pertumbuhan dan tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Provinsi Lampung juga memerlukan sumber biaya untuk meningkatkan laju pembangunan yang sedang berlangsung. Adapun sumber-sumbernya adalah dari APBN berupa proyek pelita nasional atau proyek sektoral, Inpres-Inpres, dan dari Daerah Lampung sendiri melalui APBD. Pada tabel berikut ini dapat dilihat sumber-sumber pembiayaan pembangunan Daerah Lampung selama lima tahun terakhir.

Tabel 2
Pembiayaan Pembangunan Daerah Lampung
Selama Tahun 2011 – 2015

Tahun	APBN	Inpres-Inpres	APBD	Total
2011	77.744.672	26.700.697	9.392.500	113.837.869
2012	80.333.755	43.144.797	9.767.006	124.245.558
2013	70.230.875	41.330.633	11.152.000	124.733.508
2014	78.824.219	39.929.917	22.945.470	141.699.606
2015	83.235.436	31.490.667	30.728.996	145.455.099
TOTAL	392.368.957	182.576.711	83.985.972	654.971.640

Sumber : *BAPPEDA Provinsi Lampung, 2018*

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan dana pembangunan Provinsi Lampung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir ini. Apabila dilihat dana yang bersumber dari APBN, maka hanya pada tahun 1983 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar -10,06 Untuk dana Inpres terdapat penurunan pada dua tahun terakhir dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar - 3,39 % pada tahun 1984 dan - 21,14 % pada tahun 1985. Untuk dana pembangunan yang berasal dari APBD mengalami kenaikan terus menerus selama periode tersebut di atas. Peranan dana APBD dalam pembangunan Daerah Lampung masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Selama lima tahun terakhir dana pembangunan yang berasal dari daerah hanya sebesar

12,75 sedangkan untuk dana yang berasal APB N sebesar 59,55 % dan dari Inpres-Inpres sebesar 27,70 Jadi berarti dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di Daerah Lampung sangat tergantung pada dana dari pusat.

Dari kenyataan ini, berarti Prosinsi Lampung masih memerlukan tambahan dana untuk dapat membiayai pembangunan agar dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini berarti Daerah Lampung perlu untuk lebih mengefektifkan sektor-sektor yang dapat menunjang dalam meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu sektor yang dapat membantu meningkatkan dana pembangunan yang dimaksud adalah sektor investasi masyarakat, baik investasi perseorangan maupun investasi dari perusahaan-perusahaan di samping investasi pemerintah serta perencanaan kebutuhan dana pembangunan lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan permasalahan di sini adalah seberapa besar kebutuhan investasi dan sumber biaya pembangunan melalui pendekatan pola perencanaan kebutuhan investasi dan sumber dana pembangunan yang perlu diusahakan penerimaannya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah Lampung

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui berapa besar jumlah investasi masyarakat di Daerah Lampung dalam menunjang pertumbuhan ekonomi untuk lima tahun yang akan datang.
2. Ingin mengetahui besarnya masing-masing sumber biaya pembangunan di Daerah Lampung baik dari pemerintah pusat maupun dari daerah sendiri yang berupa proyek sektoral, Inpres-Inpres, subsidi rutin, subsidi pembangunan dan pendapatan asli daerah untuk lima tahun mendatang.
3. Untuk mengetahui besarnya seluruh dana pembiayaan pembangunan Daerah Lampung secara keseluruhan dari pemerintah daerah serta dari tingkat nasional selama lima tahun. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah Daerah Lampung dalam menentukan kebijaksanaan pembangunan

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pembangunan Ekonomi

Sampai sekarang ini belum ada satupun definisi pembangunan ekonomi yang sama sekali tepat dan memuaskan. Namun bukan berarti teori-teori yang telah dikemukakan para ahli ekonomi itu tidak bermanfaat, melainkan teori-teori tersebut berguna dalam menentukan kebijaksanaan pembangunan suatu negara pada masa-masa yang akan datang.

Sejak Adam Smith mengeluarkan bukunya yang berjudul: "*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*" mulailah suatu era baru di mana para ahli ekonomi mengadakan penelitian dan perhatian terhadap pembangunan ekonomi suatu negara.

Melihat keadaan dunia pada masa sekarang ini, di mana sebagian kecil negara di dunia terutama negara-negara Eropa Barat, Amerika dan Kanada di mana penduduknya kurang dari sepertiga penduduk dunia menikmati sebagian besar dari pendapatan dunia, sedangkan sebagian besar penduduk dunia hidup di bawah garis kemiskinan, mulailah pembangunan ekonomi menempati perhatian yang khusus dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan para ahli ekonomi.

Sesungguhnya pembangunan ekonomi itu bukan hanya menjadi masalah bagi negara-negara yang tergolong miskin saja, tetapi negara-negara yang pendapatannya relatif sudah tinggi-pun masih tetap dihadapi pada masalah pembangunan ekonominya, yaitu bagaimana mempertahankan tingkat hidup yang relatif sudah tinggi atau agar bisa lebih ditingkatkan lagi.

Bagi negara-negara yang belum atau sedang berkembang adalah bagaimana memacu pembangunan ekonominya agar dapat lebih cepat meningkatkan taraf hidup rakyatnya pada tingkat yang lebih layak.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses, dengan proses mana pendapatan nasional riil suatu perekonomian bertambah selama suatu periode waktu yang panjang. (G. M. Meier dan R.E. Baldwin, 1971; 6).

Suatu proses berarti dalam pembangunan ekonomi itu bekerja berbagai kekuatan-kekuatan tertentu dalam menciptakan pendapatan nasional. Jadi di sini kita tidak dapat menyelidiki satu demi satu sektor-sektor yang berpengaruh di dalam pembangunan ekonomi. Kesemuanya itu saling berhubungan satu sama lainnya, saling menunjang dan melengkapi dalam suatu kerja sama yang tidak dapat dipisahkan, sehingga membentuk suatu proses secara keseluruhan dalam menciptakan pendapatan nasional riil yang benar-benar bertambah.

Pendapatan nasional riil berarti hasil akhir daripada barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara yang dinyatakan dalam arti riil. Ada dua pengertian di dalam pendapatan nasional, yaitu produk nasional bruto dan produk nasional netto. Produk nasional bruto adalah jumlah total dari barang-barang dan jasa akhir yang dihasilkan yang belum memperhitungkan penggantian-penggantian barang modal. Produk nasional netto adalah meliputi barang-barang dan jasa akhir yang memperhitungkan penggantian barang-barang modal dan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan harga. Jadi dapat dikatakan bahwa pendapatan nasional riil itu adalah kata lain daripada produk nasional netto.

Periode waktu yang panjang berarti peningkatan pendapatan nasional riil yang berlangsung secara terus-menerus itu harus berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Apabila perubahan itu hanya dihitung dalam jangka pendek, maka perubahan tersebut hanya merupakan suatu perubahan yang kecil yang pada suatu saat kemungkinan dapat berubah tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Perhitungan dalam jangka panjang bukan dihitung dari tahun ke tahun, tetapi dihitung dari beberapa dasawarsa. Jadi kalau pembangunan yang biasa berlangsung dalam waktu antara 6 sampai 15 tahun, maka pembangunan jangka panjang yang terus-menerus membutuhkan waktu minimal 25 tahun.

2.2 Tujuan Pembangunan Ekonomi .

Tujuan pembangunan ekonomi adalah disamping menaikkan pendapatan nasional riil juga menaikkan produktivitas (Irawan dan M. Suparmolco, 1981, 19). Banyak pendapat menyatakan bahwa pembangunan ekonomi itu bukan hanya untuk menambah output nasional saja, tetapi perlu juga diperhatikan pertumbuhan

penduduk negara yang bersangkutan. Berarti di samping pertumbuhan output nasional perlu juga diperhatikan pendapatan nasional per kapita. Meskipun output nasional meningkat, tetapi jika peningkatan jumlah penduduk lebih cepat lagi atau sama dengan peningkatan output nasional maka pendapatan per kapita tidak bertambah bahkan kemungkinan menjadi lebih kecil. Jadi di sini diperlukan pertambahan pendapatan nasional yang lebih besar dari pertumbuhan penduduk

Banyak negara tetap menggunakan pendapatan nasional riil sebagai ukuran daripada pembangunan ekonomi. Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut : Pertama, bagi negara-negara yang telah maju dimana taraf hidup masyarakatnya sudah tinggi dan pembagian pendapatan sudah lebih merata, maka tujuan pembangunan ekonomi adalah bagaimana mempertahankan kelangsungan pertambahan pendapatan nasional untuk menghindari inflasi dan deflasi yang serius. Kedua, apabila pendapatan per kapita dipakai sebagai ukuran keberhasilan pembangunan, maka kita akan berada pada posisi yang sulit. Misalkan saja suatu negara mengalami pertumbuhan pendapatan nasional tetapi jumlah penduduknya mengalami pertumbuhan sama dengan pendapatan nasional maka kita akan menilai negara tersebut tidak berkembang, tetapi dalam kenyataannya negara tersebut mengalami pertumbuhan output nasionalnya. Ketiga, apabila pendapatan per kapita tetap dijadikan ukuran, maka akan terjadi penyempitan pandangan kita. Apabila hal ini terjadi maka penduduk merupakan faktor penentu dalam menentukan pembangunan ekonomi . Padahal sebenarnya terjadi penduduk hanyalah salah satu variabel yang mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara.

Peningkatan produktivitas adalah juga merupakan tujuan yang pembangunan ekonomi. Dibanyak negara, terutama negara-negara Arab terjadi peningkatan pendapatan nasional secara pesat jauh di atas pertumbuhan penduduk , ini berarti pendapatan nasional per kapita juga meningkat. Akan tetapi hal itu hanya disebabkan oleh satu sektor yaitu minyak, namun sektor-sektor lain yang juga mempengaruhi pendapatan nasional berkembang dengan lambat. Kita melihat bahwa walaupun pendapatan nasional negara-negara Arab tersebut meningkat cepat, tetapi tenaga ahli yang bekerja di negara mereka banyak berasal dari negara lain. Dengan demikian berarti mereka masih banyak kekurangan tenaga ahli dan

spesialisasi. Jika demikian mereka tidak dapat digolongkan pada negara yang sudah maju meskipun pendapatan nasionalnya tinggi, karena mereka hanya maju disatu pihak, dilain pihak masih banya kekurangan-kekurangannya. Jadi pengertian pembangunan ekonomi itu haruslah mencakup semua sektor yang mempengaruhinya secara seimbang dan menyeluruh. Di samping meningkatkan pendapatan nasional, juga harus dapat diciptakan tenaga-tenaga ahli yang profesional sehingga proses produksi dapat berjalan efektif dan efisien serta pembagian pendapatan dapat menjadi lebih merata .

2.3 Hipotesis

Hipotesis di dalam penulisan ini adalah :

1. Pendapatan asli semakin meningkat peranannya terhadap penerimaan daerah dibandingkan subsidi-subsidi dari pemerintah pusat .
2. Dana pemerintah pusat untuk Daerah Lampung dalam bentuk proyek sektoral dan Inpres-Inpres masih sangat dominan terhadap dana pembangunan pada masa yang akan datang.:
 - Biro Pusat Statistik Provinsi Lampung untuk memperoleh data pertumbuhan ekonomi Daerah Lampung.
 - Biro Keuangan Provinsi Lampung guna memperoleh data subsidi pembangunan, subsidi rutin, pendapatan asli Daerah Lampung serta belanja rutin Daerah Lampung.

III. GAMBARAN UMUM DAERAH LAMPUNG

3.1 Potensi Wilayah

3.1.1 Kondisi Wilayah

Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 2019 dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-14 tahun 1964. Sebelumnya Provinsi Lampung merupakan salah satu kresidenan yang tergabung dalam Provinsi Sumatera Selatan (REPELITA IV, buku I).

Provinsi Lampung terletak di ujung pulau Sumatera yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan.
- Sebelah Selatan dengan Selat Sunda.
- Sebelah Barat dengan Samudra Indonesia.
- Sebelah Timur dengan Laut Jawa.

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung, terdiri atas tiga Kabupaten dan satu Kotamadya, yaitu :

- Kotamadya Bandar Lampung dengan ibukota Bandar Lampung, terdiri dari 9 kecamatan dan 58 desa.
- Kabupaten Lampung Selatan dengan ibukota Kalianda, terdiri dari 20 kecamatan dan 540 desa.
- Kabupaten Lampung Tengah dengan ibukota Metro, terdiri dari 23 kecamatan dan 450 desa.
- Kabupaten Lampung Utara dengan ibukota &otabumi, terdiri dari 24 kecamatan dan 617 desa.

Dari data di atas terlihat bahwa Kotamadya Bandar Lampung meliputi daerah seluas 169,21 Km², Kabupaten Lampung Selatan seluas 6 649,29 Km², Kabupaten Lampung Tengah meliputi daerah seluas 9 184,50 Km², serta Kabupaten Lampung Utara seluas 19 368,50 Km².

Pelabuhan Utama Daerah Lampung adalah Panjang dan Bakauheni. Di samping itu terdapat pula pelabuhan – pelabuhan kecil lainnya, seperti serengsem, Kota Agung, Labuhan Meringgai, Ketapang dan Pelabuhan Krui. Lapangan terbang utamanya Branti dan lapangan terbang AURI adalah Astra Kesetra di Menggala. Pelabuhan bis utama di Provinsi Lampung adalah terminal bis Rajabasa di Bandar Lampung.

3.1.2 Potensi Wilayah.

Sebagian besar penduduk Lampung bermata pencaharian di bidang pertanian, berarti penggunaan tanahnya sebagian besar adalah tanah pertanian. Dari Tabel 6 berikut terlihat sampai dengan tahun 1985 luas penggunaan tanah pertanian (termasuk sawah, pertanian lahan kering, perkebunan serta kebun campuran) mencapai 1 347 691 Ha, kolam ikan 1321 Ha, tanah pemukiman 125 128 Ha, Hutan 622 671 Ha, sisanya adalah alang-alang, semak, belukar dan tanah kosong. Dengan demikian berarti dari seluas 3 301 545 Ha penggunaan tanah di Lampung, untuk pertanian telah mencapai 40,82 persen.

Melihat kenyataan di atas berarti sampai saat ini sektor pertanian masih merupakan potensi utama yang diandalkan untuk Daerah Lampung dan kemungkinan pada tahun-tahun yang akan datang komoditi ini masih dominan dalam sumbangannya terhadap output daerah.

Selain pertanian, Daerah Lampung juga mempunyai potensi untuk hasil-hasil tambang, hanya saja sebagian besar belum diusahakan. Pada buku I Repelita IV Daerah Lampung telah dikemukakan hasil-hasil tambang yang terdapat di Daerah Lampung, seperti minyak bumi sebagai lanjutan dari endapan minyak bumi di Daerah Sumatera Selatan yakni terdapat disebelah timur laut Provinsi Lampung, Mesuji, Menggala,

Kotabumi dan Sukadana. Uranium kemungkinan bisa dijumpai di bukit Arakan, gunung Surian, bukit Semong, bukit Lematang dan pulau Tabuan. Batubara muda terdapat dibagian hulu Wai Tulang Bawang dan wilayah . Padang Ratu. Mineral besi terdapat di Sukadana dan dekat Labuhan Meringgai. Emas dan perak disebelah barat Wai Semangka dan di hulu Wai Rilau. Marmer terdapat di hulu Wai Rilau dan

di bukit Arakan serta Wai Pemerintahan. Untuk tambang marmer sekarang ini sudah mulai diusahakan. Sumber air panas dan gas bumi terdapat di lembah Sesoh, Wai Bihan, Natar, Ngerip, Kota Agung dan Wai Muli dekat Kalianda.

Dari keterangan di atas berarti Daerah Lampung selain pertanian juga kaya akan sumber-sumber ekonomi lainnya yang mempunyai harapan keuntungan lebih besar apabila diusahakan. Sekarang masalahnya adalah bagaimana usaha pemerintah daerah untuk menarik minat semua pihak guna mengusahakan sumber-sumber tersebut secara ekonomis sehingga pada saatnya nanti Daerah Lampung tidak hanya mengandalkan sektor pertanian, tetapi mempunyai alternatif lain sebagai sarana dalam mendorong laju pembangunan ekonomi daerah.

3.2 Penduduk.

Daerah Lampung merupakan salah satu Provinsi yang sangat pesat perkembangan penduduknya. Sekitar awal tahun 1970 Daerah Lampung merupakan provinsi utama dalam tujuan program transmigrasi nasional. Bahkan sejak jaman penjajahan Belanda sudah ada transmigrasi dari pulau Jawa di Gedong Tataan Lampung Selatan.

Sejak tahun 1980 Provinsi Lampung tidak lagi menerima transmigrasi yang berasal dari pulau Jawa dan pulau lainnya. Hal ini dikarenakan kepadatan penduduk di Provinsi Lampung sudah cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di luar pulau Jawa. Bahkan pada saat sekarang ini pemerintah daerah telah mulai mengadakan pemukiman kembali penduduk dari Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Tengah menuju Kabupaten Lampung Utara yang masih jarang penduduknya. Dengan program transmigrasi lokal ini diharapkan adanya peningkatan output daerah dengan dibukanya areal pemukiman dan pertanian baru yang lebih luas di samping meningkatkan produktivitas areal yang telah ada. Selain itu juga berkurangnya penduduk dari kawasan hutan lindung dan tanah kritis akan memberikan dampak yang positif bagi keseimbangan alam dan lingkungan. Penyuluhan kepada penduduk yang bertani/berladang secara berpindah-pindah tempat juga dapat mengurangi makin meluasnya tanah kritis serta pengrusakan hutan-hutan.

Sampai tahun 1985 penduduk kampung berjumlah 5 139 680 orang, dengan perincian: Kotamadya Bandar Lampung sebanyak 512 14-3 orang, Kabupaten Lampung Selatan 1 672 111 orang, Kabupaten Lampung Tengah 1 746 292 orang serta Kabupaten Lampung Utara sebanyak 1 209 131 orang.

Berdasarkan data di atas penduduk Lampung dari tahun ke tahun mengalami perkembangan secara terus-menerus. Pada tahun 1975 berjumlah 3 308 833 orang, berarti sampai dengan tahun 1985 penduduk Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 55*33 Pertumbuhan yang paling pesat pada periode di atas terjadi pada Kotamadya Bandar Lampung sebesar 142,28 % serta Kabupaten Lampung Utara sebesar 125,22 Sedangkan untuk Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Tengah sebesar 29,35 % dan 44,05. Jadi berarti Kotamadya Bandar Lampung mempunyai pertumbuhan penduduk yang tertinggi. Hal ini dapat dimaklumi karena merupakan Ibukota Provinsi. Sedangkan Kabupaten Lampung Utara pertumbuhan penduduk yang tinggi dipengaruhi juga oleh program transmigrasi lokal pemerintah daerah.

3.3 Struktur Perekonomian Daerah Lampung.

Pengembangan Daerah Lampung merupakan bagian dari pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata materiel dan spirituil berdasarkan Pancasila. Jadi berarti arah pembangunan jangka panjang itu tidak hanya mengejar kemajuan lahirnya saja, tetapi mencakup segala aspek kehidupan, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Sasaran pembangunan ekonomi jangka panjang di samping meningkatkan output nasional secara terus-menerus, juga berusaha mempercepat laju pertumbuhan lapangan kerja sebagai pencerminan dari timbulnya perbaikan pemerataan kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang di capai pada masa sebelumnya (Sadono Sukirro, 1985;19). Dalam melihat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang telah dicapai. Berikut ini dapat

dilihat laju pertumbuhan ekonomi Daerah Lampung serta peranan berbagai sektor yang produktif.

Pada Tabel 8 berikut terlihat produk domestik regional bruto Provinsi Lampung berdasarkan harga konstan tahun 1975 dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dari sebesar Rp 232 056 616 000,00 tahun 1975 sehingga menjadi Rp 498 529 788 000,00 tahun 1985, berarti selama periode di atas telah terjadi peningkatan sebesar 114,83 persen

Apabila kita melihat dari sumbangan masing-masing sektor, sektor pertanian masih merupakan pemberi sumbangan terbesar bagi output daerah kemudian diikuti sektor perdagangan, restoran dan perhotelan, sektor industri, sektor pengangkutan dan telekomunikasi serta sektor-sektor lainnya. Sektor pertanian secara riil mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 1975 sebesar Rp 130 853 962 000,00 dan menjadi Rp 233 356 985 000,00 tahun 2019 hanya pada tahun 2018 dan tahun 2018 sektor ini mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Sektor perdagangan, restoran dan perhotelan mengalami penurunan secara riil pada tahun 1982 dan tahun 1983, sedangkan untuk tahun-tahun yang lainnya mengalami peningkatan terus-menerus. Pada tahun 1908 berjumlah Rp 40 187 716 000,00 sampai tahun 2018 menjadi sebesar Rp 101 323 833 000,00.

Sektor industri sebagai pemberi sumbangan terbesar ketiga bagi produk Daerah Lampung mengalami penurunan pada tahun 1984. Nilai riil sektor industri pada tahun 192016 berjumlah Rp 16 874 422 000, 00, kemudian terus mengalami peningkatan hingga menjadi Rp 50 102 020 000,00 pada tahun 1988. Untuk sektor-sektor ekonomi lainnya setiap tahun juga mengalami peningkatan dalam sumbangannya terhadap produk domestik regional bruto Daerah Lampung.

Selain melihat pertumbuhan tiap-tiap sektor ekonomi secara riil, berikut ini dapat dilihat juga perkembangan persentase sumbangan masing-masing sektor terhadap output Daerah

Berdasarkan Tabel 9 di atas terlihat sektor pertanian merupakan pemberi sumbangan yang terbesar bagi output daerah meskipun perkembangan sektor ini

mulai sedikit ada penurunan. Pada tahun 1975 sumbangannya adalah sebesar 56,59 % dan menjadi 46,81 % pada tahun 1985, dengan tingkat sumbangan terendah terjadi pada tahun 1982 sebesar 41,97

Dengan melihat perkembangan di atas, meskipun sektor per taniaan masih memegang peranan yang dominan, namun sedikit demi sedikit telah menunjukkan suatu perkembangan menuju pola yang lebih seimbang antara sektor pertanian dengan sektor-sektor lainnya.

Sektor Perdagangan, restoran dan perhotelan tetap merupakan pemberi sumbangan terbesar kedua setelah sektor pertanian. Secara rata-rata sumbangan sektor ini selama periode tahun 1975-1985 adalah sebesar 20,00 % per tahun dengan sumbangan tertinggi terjadi tahun 1979 sebesar 23,96 % dan sumbangan terendah sebesar 17,05 % yang terjadi pada tahun 1977. Selanjutnya adalah sektor industri yang juga mengalami perkembangan yang menggembirakan setiap tahunnya. Pada tahun 1975 sektor ini memberi sumbangan sebesar 7,2 % dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai puncaknya pada tahun 1983 sebesar 12,04 kemudian mengalami sedikit penurunan pada dua tahun berikutnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa pemerintah Daerah Lampung telah mulai memprioritaskan perkembangan sektor industri sebagaimana prioritas dalam pembangunan nasional.

Sektor pengangkutan, komunikasi dan sektor pemerintahan juga memberikan sumbangan yang cukup bagi peningkatan output Daerah Lampung. Kedua sektor ini mengalami sedikit perkembangan dimana pada tahun 1975 sumbangan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 5,00 dan mencapai puncaknya pada tahun 1985 sebesar 7,55 kemudian menurun kembali menjadi sebesar 6,15 % pada tahun 2013. Untuk sektor pemerintahan rata-rata memberikan sumbangan sebesar 6,32 % per tahun dengan sumbangan tertinggi di capai pada tahun 1982 sebesar 7,57

Sektor yang tidak mengalami perkembangan dan bahkan menunjukkan penurunan sumbangannya terhadap output Daerah Lampung adalah sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini dapat dimaklumi karena meskipun menurut penelitian Daerah Lampung juga banyak mengandung bahan-bahan galian, tetapi sebagian besar belum diusahakan secara ekonomis. Demikian pula dengan sektor

lainnya seperti listrik, gas dan air minum, bangunan dan konstruksi, sewa rumah, bank dan lembaga keuangan lainnya serta jasa-jasa memberi sumbangan yang relatif kecil persentasenya terhadap produk domestik Daerah Lampung dan mengalami perkembangan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Peningkatan-peningkatan yang terjadi pada sektor-sektor perekonomian di atas menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian Daerah Lampung semakin meningkat pula, guna mendorong kegiatan ekonomi pada tingkat yang lebih cepat lagi diperlukan persediaan kapital yang lebih besar sebagai dana untuk investasi.

3.4 Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lampung

Pertumbuhan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh kenaikan pendapatan nasionalnya. Adanya pertumbuhan ekonomi tidak mutlak menunjukkan peningkatan pembangunan ekonomi di negara tersebut, tetapi harus pula diperhitungkan pertumbuhan penduduk di negara yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam pertumbuhan ekonomi ada dua segi yang harus diperhitungkan yaitu pendapatan nasional dan pendapatan per kapita di samping faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan tersebut.

Untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi Daerah Lampung dapat di lihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Lampung dengan membagi selisih antara PDRB tahun sekarang dan tahun yang lalu dibagi dengan PDRB tahun yang lalu.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat laju pertumbuhan ekonomi riil Daerah Lampung selama tahun 1975-1985 atas dasar harga konstan tahun 1975 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 7,97 % per tahun. Pendapatan Daerah Lampung ini terus berkembang dari tahun ke tahun di mana pada tahun 1975 tercatat sebesar Rp 232 056 618 000,00 dan menjadi Rp 498 529 788 000,00 pada tahun 1985. Laju pertumbuhan dicapai pada tahun 1978 yaitu sebesar 11,87 Laju pertumbuhan di atas bukan dipengaruhi oleh sektor pertanian yang justru menurun, tetapi dipengaruhi oleh naiknya penerimaan yang cukup besar dari sektor-sektor perdagangan, restoran dan perhotelan, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor pemerintahan.

Penurunan yang terendah terjadi pada tahun 1982 yaitu sebesar 2,66 Penurunan ini disebabkan oleh turunnya penerimaan dari sektor pertanian dan sektor perdagangan, restoran dan perhotelan.

Kecilnya pertumbuhan pendapatan per kapita dan bahkan ada yang mempunyai nilai minus menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Daerah Lampung yang cukup tinggi belum dapat diimbangi oleh kenaikan penerimaan daerahnya. Apabila dibandingkan dengan pendapatan per kapita tingkat nasional maka pendapatan per kapita Daerah Lampung masih relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak daerah-daerah lain yang mempunyai pendapatan per kapita lebih besar dari Daerah Lampung bahkan lebih tinggi dari tingkat nasional, terutama bagi daerah-daerah yang mempunyai sumber penerimaan dari minyak dan gas bumi. Dengan demikian berarti penduduk Daerah Lampung belum dapat menikmati hasilhasil pembangunan nasional secara lebih baik (Lampung Dalam Angka Tahun 1985-1986; 531).

3.5 Sumber Pembiayaan Pembangunan di Daerah Lampung.

3.5.1 Investasi Masyarakat di Daerah Lampung.

Investasi masyarakat di Provinsi Lampung diasumsikan terdiri dari modal perusahaan swasta dan modal perseorangan. Penyertaan modal dari perusahaan diasumsikan sebesar penyediaan fasilitas-fasilitas swasta oleh bank-bank pemerintah dan swasta di Lampung, sedangkan peran serta perseorangan diasumsikan sebesar tabungan dari masyarakat yang tersalur pada lembaga perbankan. Besarnya modal perusahaan serta perkembangannya selama ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Melihat kenyataan di atas, meskipun kredit investasi merupakan penyumbang terbesar tetapi mengalami perkembangan yang paling rendah diantara ketiganya, sedangkan KIK yang merupakan penyumbang terendah justru mengalami perkembangan yang paling pesat. Hal ini berarti perkembangan perusahaan-perusahaan di Daerah Lampung lebih pesat untuk yang memiliki modal menengah bawah, dengan demikian akan terbuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat di Daerah Lampung karena biasanya perusahaan seperti ini lebih

banyak menggunakan tenaga kerja dibandingkan barang modal. Selanjutnya hal ini berpengaruh juga pada peningkatan serta pemerataan pendapatan masyarakat.

Secara keseluruhan dana investasi masyarakat mengalami peningkatan terus-menerus selama tahun 1975-1984, dengan peningkatan rata-rata sebesar 24,68 # per tahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 1977 yaitu sebesar 61,82 sedangkan peningkatan terendah sebesar 2,58 % terjadi pada tahun 1978. Adanya peningkatan secara terus-menerus ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Daerah Lampung akan pentingnya pembangunan sudah semakin meningkat.

3.5.2 Dana Pembiayaan Pembangunan dari Pemerintah Pusat

Dalam pelaksanaan program pembangunan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang di Daerah Lampung sebagian besar sumber dana berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk proyek-proyek sektoral, Inpres-inpres, subsidi rutin dan subsidi pembangunan. Untuk: dana yang berupa subsidi menjadi bagian daripada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan proyek sektoral dan Inpres-inpres merupakan bagian langsung pembangunan nasional. Pertama, akan diketengahkan perkembangan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk proyek sektoral dan proyek inpres, sedangkan untuk subsidi dibahas bersama-sama dengan pendapatan asli Daerah Lampung sebagai unsur di dalam APBD.

Dana proyek sektoral memberikan andil yang terbesar, hal ini bisa dimaklumi karena merupakan proyek pelita nasional. Selain tahun 1979 dan tahun 1983 dan ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 1975 berjumlah Rp 9 273 748 000,00 menjadi Rp 83 235 436 000,00 tahun 1985. Untuk dana inpres juga memberikan sumbangan yang cukup besar, di mana pada tahun 1975 berjumlah Rp 5 243 634 000,00 mencapai puncaknya tahun 1983 sebesar Rp 41 330 633 000,00, sedangkan pada dua tahun berikutnya mengalami sedikit penurunan. Turunnya dana ini dipengaruhi juga oleh turunnya dana proyek inpres sekolah dasar untuk Daerah Lampung. Pada sekitar tahun 1975 hingga awal tahun 1980 melalui program wajib belajar Daerah Lampung banyak menerima dana proyek inpres sekolah dasar. Tetapi karena pada tahun-tahun terakhir ini sekolah dasar di Daerah Lampung

dirasakan sudah cukup memadai maka sedikit demi sedikit dana ini dikurangi hingga mempengaruhi pula jumlah keseluruhan dana inpres yang diterima.

3.5.3 Dana Pembiayaan Pembangunan dari Daerah Lampung

Selain dana proyek sektoral dan Inpres-inpres yang dikelola secara langsung oleh pemerintah pusat, terdapat juga sumber dana dari Daerah Lampung sendiri yaitu melalui pendapatan asli daerah serta subsidi-subsidi dari pusat yang menjadi bagian dari penerimaan daerah.

Berdasarkan tabel di atas terlihat perkembangan penerimaan Daerah Lampung yang cukup menggembirakan. Selama periode tahun 1975-1985 rata-rata terjadi peningkatan sebesar 26,34 % per tahun dengan peningkatan tertinggi, terjadi pada tahun 1980 sebesar 61,10 Pada tahun 1975 tercatat sebesar Rp 8 558 388 350,00 sampai dengan tahun 1985 menjadi sebesar Rp 82 627 933 920,00 atau terjadi peningkatan sebesar 865,46

Subsidi pembangunan juga mengalami peningkatan. Tahun 2008 jumlah Rp 2 292 251 800,00 menjadi Rp 11 116 018 540,00 tahun 2018 atau meningkat sebesar 584,94 % selama periode tersebut. Untuk subsidi rutin pada tahun 2008 sebesar Rp 4 779 888 750,00 dan menjadi Rp 52 718 959 210,00 tahun 2018 atau meningkat sebesar 1002,93 % selama periode di atas. Pendapatan asli Daerah Lampung juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pada tahun 2018 berjumlah sebesar Rp 1 486 247 820,00 dan menjadi Rp 18 792 956 820,00 pada tahun 1985 atau selama periode di atas meningkat sebesar 1164,46

Berdasarkan pembahasan di atas berarti dari ketiga sumber penerimaan Daerah Lampung, pendapatan asli mengalami perkembangan yang paling pesat. Hal ini menunjukkan peranan dana daerah mulai meningkat dan diharapkan pada masa yang akan datang ketergantungan yang besar akan dana dari pusat dapat lebih dikurangi.

Pada Tabel 17 dapat dilihat bagaimana besarnya peranan dana dari daerah dibandingkan dana dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah Lampung selama tahun 2008-2019. Dana sektoral merupakan penyumbang

terbesar yaitu sebesar 44,38 % dari seluruh dana, kemudian disusul oleh dana inpres sebesar 21,06 subsidi rutin 20,58 pendapatan asli 7,35 % dan yang terakhir adalah subsidi pembangunan sebesar 6,63

Tabel 17
Persentase Dana Daerah dan Dana Pusat Terhadap Dana Pembangunan Daerah Lampung Tahun 2008-2011 (dalam ribuan rupiah)

Sumber Dana	Jumlah		Persentase
Dana Sektoral	Rp 502.269	179,00	44,38
Dana Inpres	Rp 238.373	101,00	21,06
Subsidi Rutin	Rp 232.945	701,57	20,58
Subsidi Pembangunan	Rp 74.993	525,20	6,63
Pendapatan Asli Daerah Lampung	Rp 83.192	750,88	7,35

Sumber : Biro Keuangan dan BAPPEDA Tingkat I Lampung, data diolah.

Melihat kenyataan di atas peranan dana Daerah Lampung masih relatif kecil, hal ini berarti ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat besar. Keadaan seperti ini kemungkinan masih akan tetap berlangsung untuk masa-masa yang akan datang. Turunnya harga minyak dipasaran dunia mempengaruhi pula penerimaan negara, dengan demikian kemungkinan dapat mengurangi bantuan untuk Daerah Lampung. Oleh karena itu pemerintah sekarang ini berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor di luar minyak dan gas bumi guna menutupi kekuarangan-kekuarangan yang terjadi. Daerah Lampung dengan sumber-sumbernya sebagian besar berasal di luar dari sektor pertambangan dapat membantu pemerintah pusat dengan jalan meningkatkan kapasitas produksi yang telah ada guna mengetahui berapa besar biaya pembangunan di Daerah Lampung, perlu kiranya kita melihat bagaimana perkembangan belanja rutin Daerah Lampung pada masa-masa yang lalu.

Berdasarkan kenyataan di atas berarti kebutuhan belanja rutin Daerah Lampung kian lama semakin meningkat seiring dengan makin giatnya pelaksanaan pembangunan yang sedang berlangsung.

IV. HASIL PERHITUNGAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Perhitungan

4.1.1 Perhitungan Investasi.

Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tetap (k) sebesar 0,0797396903 ceterisparibus, maka akan diperoleh perkiraan Pendapatan Regional Daerah Lampung (PDRB) pada tahun yang akan datang, yaitu : Berdasarkan hasil perhitungan Produk Domestik Regional Bruto di atas, maka perkiraan kebutuhan investasi masyarakat di Daerah Lampung untuk lima tahun yang akan datang dapat diperoleh dengan mengalikan angka ICOR sebesar 2,230108423 dengan perubahan PDRB.

4.1.2 Perhitungan Dana Sektoral

Setelah diestimasi secara statistik, maka diperoleh perkiraan laju pertumbuhan dana pembangunan di dalam APBN (Gpn) adalah sebagai berikut : Tahun 1986 adalah sebesar 0,1034331151; tahun 1987 sebesar 0,086910140; tahun 1988 sebesar 0,079960740; tahun 1989 sebesar 0,074040414 dan tahun 1990 sebesar 0,068936339. Dari hasil perhitungan di atas serta dengan tingkat elastisitas rata-rata dana sektoral terhadap dana pembangunan nasional sebesar 3,290123976 ceterisparibus, maka diperoleh perkiraan dana sektoral untuk Daerah Lampung

4.1.3 Perhitungan Dana Proyek Inpres.

Dengan laju pertumbuhan dana pembangunan APBN sama dengan perhitungan dana proyek sektoral serta dengan elastisitas rata-rata sebesar 1,369555606 ceterisparibus, maka diperoleh perkiraan dana proyek inpres Daerah Lampung tahun 1986-1990 sebagai berikut:

4.1.4 Perhitungan Subsidi Pembangunan

Dengan laju pertumbuhan dana pembangunan nasional sama seperti perhitungan sebelumnya serta dengan tingkat elastisitas rata-rata sebesar 0,811648313 ceterisparibus

4.1.5 Perhitungan Subsidi Rutin

Setelah diestimasi secara statistik, diperoleh laju pertumbuhan anggaran rutin nasional (Grn) sebagai berikut : untuk tahun 1986 sebesar 0,227067518; tahun 1977 sebesar 0,084261303; tahun 1988 sebesar 0,077713096; tahun 1989 sebesar 0,072109262; dan tahun 1990 sebesar 0,067259247.

4.1.6 Perhitungan Pendapatan Asli Daerah Lampung

Dari hasil perhitungan secara statistik diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y_t = 7562977,353 + 1632960,076 x_t$$

Berdasarkan persamaan di atas, maka diperoleh perkiraan pendapatan asli Daerah Lampung sebagai berikut :

4.1.7 Perhitungan Belanja Rutin Daerah Lampung

Dari hasil perhitungan secara statistik diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y_t = 20776866,28 + 3531609,17 X_t$$

Dari persamaan di atas diperoleh perkiraan belanja rutin Daerah Lampung untuk tahun 1986-1990 sebagai berikut : Tabel 26. Perkiraan Belanja Rutin Daerah Lampung. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat diperoleh perkiraan biaya pembangunan Daerah Lampung untuk tahun 1986-1990, yaitu selisih antara penerimaan daerah dengan belanja rutin.

Secara keseluruhan biaya pembangunan di Daerah Lampung dapat diperoleh dengan jalan menjumlahkan antara dana proyek sektoral, dan proyek inpres dan dana daerah.

4.2 Pembahasan.

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan analisis Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan dengan melihat pertumbuhan ekonomi Daerah Lampung dari tahun 1975-1985 serta menghitung angka ICOR dari tahun ke tahun dalam

periode yang sama, maka diperoleh hasil angka rata-rata ICOR secara statistik sebesar 2,23 (dibulatkan). Hal ini berarti untuk menghasilkan pertambahan pendapatan regional daerah sebesar Rp 1,00 diperlukan investasi sebesar Rp 2,23. Secara nominal investasi masyarakat di Daerah Lampung meningkat secara terus-menerus lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 1986 investasi masyarakat Rp 88 652 632 410,00 dan terus meningkat setiap tahunnya hingga tahun 1990 menjadi Rp 120 494 687 4-70,00. Jika melihat pertumbuhan pendapatan per kapita sebesar 3,42 % serta laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,97 terdapat perbedaan yang jauh antara keduanya. Hal ini berarti hasil-hasil pembangunan di Daerah Lampung belum bisa dinikmati sepenuhnya oleh sebagian besar lapisan masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan suatu cara untuk menaikkan laju pertumbuhan ekonomi yang telah ada.

Peningkatan dalam laju pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan jalan :

1. Pengendalian pertumbuhan penduduk pada batas-batas yang diinginkan. Tetapi dengan semakin membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat cenderung dapat menaikkan tingkat pertumbuhan penduduk. Namun dengan semakin majunya suatu masyarakat dapat membuat mereka mengerti akan pentingnya suatu bentuk keluarga sejahtera. Karena itu diperlukan peningkatan pendidikan baik kualitas maupun kuantitas serta penyuluhan-penyuluhan dihidang kesehatan dan keluarga berencana oleh pemerintah maupun swasta.
2. Menurunkan ICOR. Kalau ingin menurunkan ICOR berarti harus meningkatkan produktivitas dari tingkat yang telah ada. Tetapi hal ini mempunyai kesukaran, karena kenaikan produktivitas berarti diperlukan teknik-teknik produksi baru dengan modal yang lebih kecil guna memproduksi hasil yang sama. Pada kenyataannya penemuan-penemuan teknik baru selalu menjurus pada padat modal, sehingga angka ICOR akan semakin tinggi. Oleh karena itu diperlukan pemilihan teknik-teknik produksi baru secara selektif. Dari hasil perhitungan didapat koefisien elastisitas dana sektoral Daerah Lampung terhadap dana pembangunan nasional menunjukkan tanda positif, berarti antara keduanya mempunyai hubungan yang searah. Koefisien elastisitas dana sektoral sebesar 3,29 (dibulatkan), berarti setiap kenaikan dana pembangunan nasional sebesar

1 % akan mengakibatkan peningkatan dana sektoral untuk Daerah Lampung sebesar 3,29 proyek inpres juga mempunyai koefisien elastisitas bertanda positif berarti dana ini mempunyai hubungan yang searah dengan dana pembangunan nasional. Koefisien elastisitas dana proyek inpres terhadap dana pembangunan nasional sebesar 1,37 (dibulatkan) dengan demikian berarti setiap peningkatan dana pembangunan nasional sebesar 1 akan diikuti dengan kenaikan dana proyek inpres Daerah Lampung sebesar 1,37.

Dengan melihat koefisien elastisitas di atas berarti dana pembangunan nasional mempunyai pengaruh yang besar terhadap perubahan kedua dana tersebut (dana sektoral dan dana inpres). Perubahan yang terjadi pada dana pembangunan nasional akan mengakibatkan perubahan pada tingkat yang lebih besar bagi dana sektoral maupun dana inpres di Daerah Lampung. Oleh karena itu besar kecilnya kedua dana ini tergantung pada besar kecilnya dana pembangunan nasional. Hal ini bisa dimengerti karena proyek-proyek ini dilaksanakan dengan kebijaksanaan dari pemerintah pusat.

Dilihat secara keseluruhan terdapat tiga dimensi yang menunjukkan hubungan fungsional antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah (BAPPEDA, 1986, 4), yaitu :

Pertama, dikembangkannya hubungan yang serasi antara penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang diarahkan kepada terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah yang lebih nyata, dinamis dan bertanggung jawab serta menjamin perkembangan pembangunan di daerah yang dilaksanakan bersama-sama antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

Kedua, pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang harus menunjang pembangunan nasional.

Ketiga, keserasian dan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah harus lebih ditingkatkan, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah benar-benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah

yang menjamin keseimbangan laju pertumbuhan antar daerah dan tercapainya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air dan hasil-hasilnya dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Pada prinsipnya pokok-pokok dan susunan organisasi pemerintahan di daerah yang termuat di dalam UU No. 5 Tahun 1974 dan Kepres No. 44 dan 45 Tahun 1974 menganut tiga asas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu :

Asas Dekonsentrasi : adalah kegiatan pembangunan yang berorientasi kepada sektor pembangunan, yang disebut juga pembangunan sektoral. Penyelenggaraan pembangunan ini oleh dan menjadi tanggung jawab departemen teknis, kebijaksanaan, perencanaan dan pengawasan tetap berada dalam wewenang pemerintah pusat, demikian pula pembiayaannya menjadi beban dan tanggung jawab pusat melalui APBN.

Asas Desentralisasi : adalah bagian pembangunan daerah yang kegiatan pembangunannya telah diserahkan kepada daerah dan menjadi urusan rumahtangganya sendiri. Penentuan kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasannya menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Sumber-sumber pembiayaan selain bersumber dari pendapatan asli daerah juga berasal dari pemerintah pusat yang sudah menjadi bagian dari APBD, dalam hal ini subsidi rutin dan subsidi pembangunan.

Asas Medebewind : yaitu suatu kegiatan pembangunan yang menurut setatusnya merupakan urusan dan tanggung jawab pemerintah pusat, namun pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atas pelaksanaannya. Yang termasuk dalam asas medebewind ini adalah program bantuan inpres. Tujuan bantuan inpres ini adalah untuk meningkatkan keserasian antara laju pertumbuhan antar daerah, keserasian pembangunan sektoral dan regional serta meratakan hasil pembangunan di mana rakyat di daerah yang bersangkutan turut berpartisipasi. (BAPPEDA, 1986, 10).

Berdasarkan uraian di atas, apabila dilihat ' perbandingan antara proyek sektoral dan proyek inpres sebagai dana yang berasal dari pemerintah pusat, maka

dana sektoral mempunyai peranan yang lebih besar terhadap kegiatan pembangunan di daerah. Hal ini karena proyek tersebut baik pembiayaan, pelaksanaan perencanaan serta tanggungjawabnya ada pada pemerintah pusat di mana program ini menjadi kepentingan secara nasional. Oleh karena itu diperlukan dana dalam jumlah yang cukup besar. Bagi dana inpres di mana tujuannya adalah untuk menunjang keserasian antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional diperlukan dana yang lebih sedikit.

Dari hasil perhitungan terlihat baik dalam jumlah maupun persentase perkembangannya dari tahun ke tahun proyek sektoral mempunyai peranan yang lebih besar terhadap pelaksanaan pembangunan di Daerah Lampung dibandingkan dengan proyek inpres. Pada tahun 1986 jumlah dana sektoral sebesar Rp 111 560 564 000,00 dan terus bertambah hingga menjadi Rp 276 453 891 000,00 pada tahun 1990. Sedangkan untuk dana inpres tahun 1986 berjumlah Rp 35 951 468 000,00 dan terus meningkat menjadi Rp 53 804 193 000,00 hingga tahun 1990. Besarnya dana sektoral ini adalah karena digunakan untuk membiayai pelaksanaan proyek-proyek dengan kapasitas yang cukup besar sehingga memerlukan penyediaan dana yang besar pula, seperti pembuatan jalan negara, proyek telekomunikasi, tenaga listrik dan irigasi, sedangkan proyek inpres digunakan untuk membiayai proyek yang lebih kecil, dengan demikian diperlukan persediaan dana dalam jumlah yang lebih kecil pula. Proyek-proyek inpres ini diantaranya adalah inpres pasar, inpres jalan, inpres desa dan inpres kesehatan.

Dilihat dari persentase perkembangannya, dana sektoral pada tahun 1987 bertambah sebesar 28,59 % dari tahun sebelumnya, tahun 1988 bertambah sebesar 26,31 tahun 1989 bertambah sebesar 24,36 % dan tahun 1990 bertambah sebesar 22,68 % atau secara rata-rata bertambah sebesar 25,49 % per tahun. Untuk dana proyek inpres pada tahun 1987 bertambah sebesar 11,90 tahun 1988 bertambah 10,95 tahun 1989 bertambah 10,14 % dan tahun 1990 bertambah sebesar 9,44 % atau secara rata-rata selama periode di atas meningkat sebesar 10,61 % per tahun.

Besarnya dana proyek ini serta dengan persentase perkembangannya yang tinggi pula menunjukkan bahwa di Daerah Lampung masih banyak proyek-proyek yang dinilai mempunyai kepentingan secara nasional, di mana dalam pelaksanaannya menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah pusat. Dengan adanya peningkatan yang cukup besar pada dana ini diharapkan pembangunan di Daerah Lampung dapat berlangsung dengan lebih cepat serta dengan hasil-hasil yang dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat.

Dilihat dari koefisien elastisitasnya, meskipun mempunyai nilai yang sama-sama elastis tetapi proyek sektoral mempunyai nilai yang lebih besar, hal ini berarti perubahan-perubahan yang terjadi pada anggaran nasional berpengaruh lebih besar terhadap proyek ini dibandingkan pengaruhnya terhadap proyek inpres untuk Daerah Lampung.

Di samping dana sektoral dan dana inpres sebagai dana pembangunan di daerah di mana tanggungjawabnya ada pada pemerintah pusat, terdapat juga dana dari pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah hingga menjadi urusan rumah tangga daerah yang bersangkutan. Dana tersebut adalah subsidi rutin dan subsidi pembangunan.

Nilai koefisien elastisitas subsidi pembangunan Daerah Lampung terhadap dana pembangunan nasional memberikan tanda positif, berarti antara keduanya mempunyai hubungan yang searah. Koefisien elastisitas ' subsidi pembangunan adalah inelastis yaitu sebesar 0,81 (dibulatkan), berarti setiap peningkatan dana pembangunan nasional sebesar 1 % akan menyebabkan peningkatan subsidi pembangunan untuk Daerah Lampung sebesar 0,81 Nilai koefisien elastisitas yang inelastis ini berarti perubahan yang terjadi pada dana pembangunan nasional akan menyebabkan perubahan subsidi pembangunan Daerah Lampung pada tingkat yang lebih kecil.

Untuk elastisitas subsidi rutin Daerah Lampung juga mempunyai hubungan yang searah dengan anggaran rutin nasional. Koefisien elastisitasnya sebesar 0,77 (dibulatkan) hal ini menunjukkan nilai yang inelastis, berarti setiap kenaikan

anggaran rutin nasional sebesar 1 % akan diikuti oleh kenaikan subsidi rutin untuk Daerah Lampung dengan tingkat yang lebih kecil yaitu sebesar 0,77

Kecilnya pengaruh anggaran nasional terhadap kedua subsidi ini mungkin dikarenakan meskipun dari pemerintah pusat tetapi sudah menjadi bagian dari penerimaan daerah. Kegunaan dana ini adalah untuk membantu pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. Jika pengaruh anggaran nasional sangat besar terhadap kedua subsidi ini, maka pelaksanaan kegiatan pemerintahan di daerah dapat saja terganggu apabila terjadi penurunan anggaran nasional pada tingkat yang sedikit tinggi. Hal ini karena sebagian besar penerimaan daerah masih merupakan bantuan dari pemerintah pusat.

Kalau dilihat dari jumlah kedua subsidi di atas, subsidi pembangunan mempunyai nilai yang lebih kecil daripada subsidi rutin. Pada tahun 1986 jumlah subsidi pembangunan sebesar Rp 12 049 205 180,00 dan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga menjadi Rp 15 376 560 940,00 hingga tahun 1990. Sedangkan jumlah subsidi rutin tahun 1986 sebesar 61 907 417 680,00 dan menjadi Rp 77 514 142 710,00 hingga tahun 1990. Kecilnya dana subsidi pembangunan ini mungkin dikarenakan dana ini hanya sebagai penunjang pembangunan nasional. Jadi sebenarnya sumber dana pembangunan itu adalah dana sektoral sedangkan dana yang lain adalah sebagai pelengkap. Besarnya subsidi rutin ini mungkin dikarenakan pendapatan asli daerah sebagai sumber dana bagi kegiatan pemerintah di Daerah Lampung masih banyak kekurangannya. Oleh karenanya diberikanlah bantuan dana oleh pemerintah pusat agar kegiatan pemerintahan di daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Selain dana yang berasal dari pemerintah pusat (proyek sektoral, inpres-inpres, subsidi rutin dan subsidi pembangunan), terdapat juga sumber dana yang berasal dari daerah sendiri sebagai dana pembangunan di daerah yang disebut dengan pendapatan asli daerah. Dengan perhitungan secara statistik, pendapatan asli Daerah Lampung mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,32 % per tahun selama periode tahun 1986 1990. Peningkatan seperti ini menunjukkan suatu perkembangan yang cukup menggembirakan karena meningkat lebih besar

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi maupun terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita Daerah Lampung.

Dari hasil perhitungan secara statistik perkiraan belanja rutin Daerah Lampung mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,53 % (dibulatkan) per tahun selama periode tahun 1986-1990. Hal ini berarti terjadi peningkatan dalam biaya penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari selama periode di atas yang meliputi pengeluaran untuk belanja barang, belanja pegawai, belanja pemeliharaan serta belanja perjalanan.

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan asli daerah sebagai sumber biaya rutin, maka belanja rutin daerah mempunyai pertumbuhan yang sedikit . lebih rendah. Bila tingkat ini tetap dipertahankan atau dapat ditingkatkan lagi pertumbuhan pendapatan asli sedangkan belanja rutin tetap atau berkurang, maka kemungkinan suatu saat pendapatan asli daerah dapat menutupi seluruh belanja rutin. Apabila keadaan seperti ini terjadi berarti mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Kalaupun besarnya subsidi dari pusat tetap maka akan makin banyak dana yang dapat dialokasikan pada kegiatan pembangunan, dengan demikian berpengaruh pula terhadap tingkat pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat pada tingkat yang lebih baik.

Tetapi melihat kenyataan sekarang ini, maka kemungkinan pendapatan asli dapat menutupi seluruh kebutuhan belanja rutin daerah masih memerlukan waktu yang cukup panjang. Berdasarkan perhitungan di atas pada tahun 1986 pendapatan asli daerah sebesar Rp 17 360 737 810,00 dan menjadi Rp 23 892 578 110,00 pada tahun 1990. Untuk belanja rutin Daerah Lampung tahun 1986 berjumlah Rp 41 966 321 300,00 dan menjadi Rp 56 092 957 980,00 pada tahun 1990. Melihat perbedaan yang cukup besar pada kedua dana tersebut, berarti pemerintah Daerah Lampung masih kekuarangan banyak dana untuk membiayai pengeluaran rutinnnya. Dengan demikian pada tahun-tahun mendatang subsidi rutin masih mempunyai peranan yang cukup besar dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan sehari-hari di Daerah Lampung.

Selanjutnya dengan melihat hasil perhitungan biaya pembangunan daerah selama periode tahun 1986-1990 terdapat peningkatan rata-rata sebesar 5>31 % per tahun. Karena biaya pembangunan ini berasal dari selisih antara penerimaan daerah (subsidi dan pendapatan asli) dikurangi belanja rutin berarti subsidi dari pusat mengalami pertumbuhan yang jauh lebih kecil dibandingkan pertumbuhan pendapatan asli daerah. Selama periode di atas lebih banyak dana APBD yang terserap untuk biaya pembangunan daripada yang terserap untuk belanja rutin. Hal ini berarti dana pembangunan regional Daerah Lampung dapat lebih besar peranannya dalam menunjang pembangunan nasional yang sedang berlangsung di daerah.

Dari hasil perhitungan secara statistik didapat total biaya pembangunan Daerah Lampung (pusat dan daerah) dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 18,72 % (dibulatkan) per tahun selama jangka waktu tahun 1986 1990. Berarti biaya pembangunan yang berasal dari dana proyek sektoral dan proyek inpres mengalami tingkat pertumbuhan yang jauh lebih tinggi daripada dana yang berasal dari daerah. Hal ini secara statistik dapat dimengerti karena koefisien elastisitas kedua dana dari pusat tersebut lebih besar dan dengan nilai yang elastis, sedangkan dana daerah yang sebagian besar bersumber dari subsidi rutin mempunyai elastisitas yang lebih kecil dan dengan nilai inelastis. Dengan perkembangan anggaran nasional yang sama maka dana sektoral dan dana inpres akan berkembang pada tingkat yang lebih pesat dibandingkan dengan dana daerah.

Peranan dana sektoral pada pembangunan di Daerah Lampung masih sangat dominan. Lebih dari lima puluh persem dana pembangunan Daerah Lampung berasal dari proyek ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Berdasarkan tabel di atas , terlihat bahwa peranan dana proyek sektoral sangat dominan terhadap dana pembangunan di Daerah Lampung. Pada tahun 1986 sumbangan proyek sektoral sebesar 56,67 % dan terus meningkat hingga menjadi 70,71 % pada tahun 1990. Dengan demikian berarti peranan dana ini pada tahun-tahun mendatang akan semakin dominan. Besarnya dana ini dengan peningkatan yang tinggi mungkin dikarenakan kebutuhan akan pembangunan baik fisik

maupun non fisik di Daerah Lampung masih banyak kekurangannya. Dana daerah menunjukkan peranan yang lebih besar daripada dana proyek inpres, tetapi kedua dana tersebut menunjukkan peranan yang semakin menurun terhadap kegiatan pembangunan yang ada di daerah. Hal ini mungkin dikarenakan peranan kedua dana tersebut hanya sebagai penunjang kegiatan pembangunan nasional dan menjaga keserasian antara pembangunan nasional dan pembangunan regional.

Perlu diketahui bahwa dana proyek sektoral terutama dialokasikan untuk pembangunan di bidang ekonomi, sosial maupun umum. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah pertanian yang mencakup pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan. Bidang industri yang meliputi industri besar, menengah dan industri kecil. Bidang perhubungan dan telekomunikasi, prasarana seperti irigasi dan jalan serta jembatan. Sedangkan yang meliputi bidang sosial dan umum meliputi kesehatan, keluarga berencana, transmigrasi, koperasi, tenaga kerja, dana sosial, pendidikan, penerangan serta bidang-bidang lainnya.

Dana proyek inpres alokasinya berupa inpres Dati I, inpres Dati II, inpres SD, inpres pasar, inpres fasilitas kesehatan, inpres penghijauan, inpres jalan dan inpres desa. Sedangkan peranan dana daerah adalah sebagai penunjang daripada pembangunan nasional. Jadi secara keseluruhan dana pembangunan di atas, baik dana sektoral, dana inpres maupun APBD ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan merata.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Usaha pembangunan ekonomi tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi mempunyai beberapa tujuan lainnya, yaitu peningkatan pendapatan per kapita yang lebih baik dan cepat, kesempatan kerja dan berusaha yang cukup, pembagian pendapatan yang lebih merata serta mengurangi perbedaan yang menyolok dalam pembangunan dan kemakmuran antara daerah yang satu dengan daerah lainnya.
2. Dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi tersebut diperlukan koordinasi yang baik. Untuk itu dibutuhkan suatu perencanaan pembangunan ekonomi, yaitu: strategi pemerintah dalam melaksanakan campur tangannya untuk menguasai atau mempengaruhi kekuatan-kekuatan pasar agar terjadi perkembangan yang lebih baik. Peranan sektor swasta berguna dalam mendukung kebijaksanaan ini dan akan dapat lebih berkembang apabila keadaan sudah menjadi lebih baik dan stabil.
3. Investasi masyarakat baik oleh rumah tangga maupun oleh perusahaan berguna dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah Lampung. Dengan ICOR sebesar 2,23 ber- untuk menciptakan tambahan output sebesar Rp 1,00 dibutuhkan investasi masyarakat sebesar Rp 2,23. Melihat perkembangan pendapatan per kapita yang jauh. lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan inves- tasi dalam jumlah yang lebih besar sehingga dengan ICOR yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar, di samping adanya pengendalian pertumbuhan penduduk dan perbaikan dalam proses produksi.
4. Dari hasil perhitungan didapat koefisien elastisitas dana proyek sektoral yang elastis dengan nilai sebesar 3,29. Hal ini berarti dana pembangunan nasional

mempunyai pengaruh yang kuat terhadap dana sektoral untuk Daerah Lampung. Dengan elastisitas yang bertanda positif berarti proyek sektoral mempunyai hubungan yang searah dengan dana pembangunan nasional.

5. Dana proyek inpres juga mempunyai hubungan yang cukup kuat dan searah dengan dana pembangunan nasional. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien elastisitasnya yang elastis sebesar 1,37. Subsidi pembangunan Daerah Lampung mempunyai hubungan yang positif dengan dana pembangunan nasional tetapi dengan pengaruh yang lemah. Keadaan ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan koefisien elastisitasnya yang mempunyai nilai inelastis sebesar 0,81. Kemudian apabila melihat pengaruh anggaran rutin nasional terhadap subsidi rutin untuk Daerah Lampung juga mempunyai hasil yang positif dengan nilai yang inelastis, yaitu sebesar 0,77. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran rutin nasional mempunyai hubungan yang searah dengan perubahan subsidi rutin untuk Daerah Lampung tetapi dengan pengaruh yang lemah. Lemahnya hubungan kedua dana ini dengan anggaran nasional, karena meskipun berasal dari pemerintah pusat namun telah menjadi urusan rumah tangga daerah yang bersangkutan.
6. Dari hasil perhitungan menggunakan analisis Trend, pendapatan asli Daerah Lampung menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi dengan rata-rata sebesar 8,52 % per tahun. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi Daerah Lampung mendorong penerimaan daerah pada tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan bila melihat belanja rutin Daerah Lampung pada periode yang sama juga menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi dengan rata-rata sebesar 7,53 % per tahun. Dengan demikian berarti pada periode di atas terdapat kenaikan yang

cukup besar bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Tetapi melihat pertumbuhan pendapatan asli yang sedikit lebih besar dari kenaikan belanja rutin, diharapkan kegiatan pemerintahan di Daerah Lampung tetap berjalan dengan baik.

7. Biaya pembangunan Daerah Lampung yang berasal dari APBD mengalami peningkatan yang lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan belanja rutin daerah, yaitu rata-rata sebesar 5,31% per tahun. Tetapi apabila dilihat dari jumlahnya, lebih banyak dana APBD yang terserap untuk biaya pembangunan daripada yang digunakan untuk belanja rutin. Hal ini berarti pembangunan regional di Daerah Lampung pada masa yang akan datang dapat lebih menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berlangsung di daerah.
8. Secara keseluruhan dana pembangunan Daerah Lampung mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu rata-rata sebesar 18,72 % per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan di Daerah Lampung setiap tahunnya semakin meningkat.
9. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Daerah Lampung masih sangat tergantung pada dana pembangunan dari pemerintah pusat. Keadaan ini tercermin dari hasil perhitungan total biaya pembangunan daerah, yang berasal dari proyek sektoral rata-rata sebesar 63,94 % per tahun, dana proyek inpres rata-rata sebesar 15,91 % per tahun dan dana APBD rata-rata sebesar 20,15 % per tahun. Dengan demikian berarti masih banyak proyek-proyek pembangunan di Daerah Lampung yang memerlukan perencanaan, pembiayaan serta pelaksanaan dan tanggung jawabnya oleh pemerintah pusat.

5.2 Saran

1. Investasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijaksanaan pemerintah dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Melihat masih perlunya peningkatan hasil-hasil investasi baik secara kualitas maupun secara kuantitas dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta dengan persediaan modal yang masih terbatas,
2. Perusahaan-perusahaan dan rumah tangga merupakan sumber daripada investasi masyarakat. Dalam usaha meningkatkan dana investasi ini diperlukan dorongan dalam meningkatkan hasrat menabung dikalangan masyarakat, diantaranya dengan cara mengurangi kegiatan yang bersifat konsumtif, kenaikan pajak barang-barang mewah dan penyederhanaan peraturan-peraturan perbankan. Di samping itu diperlukan juga peningkatan peran serta pihak swasta, antara lain melalui penyederhanaan peraturan- peraturan dalam dunia usaha, penyempurnaan fasilitas-fasilitas serta peningkatan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat.
3. Dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan suatu perencanaan yang tepat guna mengalokasikan dana untuk sektor-sektor produktif serta menyangkut kepentingan orang banyak. Dengan demikian selain menunjang pertumbuhan ekonomi, pembangunan itu juga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ace Partadiredja. "Perhitungan Pendapatan Nasional." LP3ES Jakarta, 1962.
- Anto Dajan. "Pengantar Metode Statistik" Jilid I. LP3ES, Jakarta 1979.
- Bintoro Tjokroamidjojo, Prof. Dr. "Perencanaan Pembangunan" Gunung Agung, Jakarta 1977
- Edgar M.Hoover. "Pengantar Ekonomi Regional." Diterjemahkan oleh Aditiawan Chandra. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1977
- Evaluasi Pelita III Daerah Lampung, BAPPEDA Tingkat I Lampung.
- G.M.Meier dan R.E.Boldwin. "Pembangunan Ekonomi." diterjemahkan oleh Paul Sitohang. Bhatara 1972.
- Hendra Esmara. "Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia." Gramedia, Jakarta 1986.
- Irawan, Drs, MBA dan M. Suparmoko, Dr, MA. "Ekonomi Pembangunan." BPFEUGM, Yogyakarta 1982.
- J. Supranto, MA. "Statistik Teori dan Aplikasi." Jilid II. Erlangga, Jakarta 1981.
- Jan Tinbergen. "Rencana Pembangunan." Diterjemahkan oleh Prof, Dr, A.Hafid. Universitas Indonesia (UI Press) 1979.
- Kadariah. "Ekonomi Perencanaan." Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1985.
- Lampung Dalam Angka 1985-1986, BAPPEDA dan Kantor Statis- Tingkat I Lampung.
- Lyn Squire dan Herman G.Van Der Tak. "Analisa Ekonomi Proyek-Proyek Pembangunan." Diterjemahkan oleh Paul Sitohang. Universitas Indonesia 1982.
- M. Suparmoko, Dr, MA. "Asas-Asas Ilmu Keuangan Negara." BPFEUGM Yogyakarta 1984.
- Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, BAPPEDA Tingkat I Lampung, 1986.

- Richard A. Bilas. "Teori Ekonomi Mikro" Diterjemahkan oleh Djoerban Wahid, SH. Erlangga, Jakarta 1982.
- Richard H. Leftwich. "Mikro Ekonomi." diterjemahkan oleh St. Dianjung, Bina Aksara, Jakarta 1981.
- Rustian Kamaluddin. "Metodologi Penyusunan Perencanaan kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah" EKI Vol. XXXI No. 4 December 1983.
- Sadono Sukirno. "Ekonomi Pembangunan." Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1985.
- Sadono Sukirno. "Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Ekonomi Daerah." Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1982.
- Sadono Sukirno. "Pengantar Teori Makro Ekonomi." Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1985.
- Sadono Sukirno. "Pengantar Teori Mikro Ekonomi." Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1985.
- Siagian S.P, Dr, MPA. " Administrasi Pembangunan." Gunung Agung, Jakarta 1983.
- Soetrisno P.H, Drs. "Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara." BP FEUGM, Yogyakarta 1981.
- Sritua Arief. "Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi. Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan Masai." Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta 1978.
- Sudarsono. "Pengantar Ekonomi Mikro." LP3ES 1984.
- Sudjana, Dr, MA, Msc. "Metode Statistik." Tarsito Bandung, 1982.
- Tom Gunadi. "Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD' 45." Angkasa, Bandung 198

LAMPIRAN 1

Anggaran Pembangunan Nasional Tahun 1975-1985
(dalam milyaran rupiah)

Tahun	: Jumlah Anggaran	Peningkatan Anggaran
1975	: 1 400,9	
1976	: 2 060,0	659,1
1977	: 2 159,9	99,9
1978	: 2 557,9	398,0
1979	: 4 016,1	: 1 458,2
1980	: 5 920,8	1 904,7
1981	: 6 944,0	: 1 023,2
1982	: 7 362,0	418,0
1983	: 9 903,0	: 2 541,0
1984	: 9 954,5	51,5
1985	: 10 873,9	919,4

Sumber : Pidato Kenegaraan Presiden Republik
Indonesia Tahun 1976-1986

LAMPIRAN 2

Perkiraan Anggaran Pembangunan Nasional
Tahun 1986-1990 (dalam milyaran rupiah)

Tahun:Jumlah Anggaran: Laju Pertumbuhan

1986	:	11 998,6	0,103431151
1987	:	13 041,4	0,086910139
1988	:	14 084,2	0,079960740
1989	:	15 127,0	0,074040414
1990	:	16 169,8	0,068936339

LAMPIRAN 3

Anggaran Rutin Nasional Tahun 1975-1985
(dalam milyaran rupiah)

Tahun:	Jumlah Anggaran :	Peningkatan Anggaran
1975 :	2 241,9	
1976 :	2 906,0	664,1
1977 :	3 535,4	629,4
1978 :	4 266,1	730,7
1979 :	6 698,8	: 2 432,7
1980 :	10 227,0	: 3 528,2
1981 :	12 212,6	: 1 985,6
1982 :	12 418,3	205,7
1983 :	14 422,7	: 2 004,4
1984 :	15 905,5	: 1 482,8
1985 :	14 951,5	: — 954,0

Sumber :. Pidato Kenegaraan Presiden
Republik Indonesia Tahun
1976 - 1986.

LAMPIRAN 4

Perkiraan Anggaran Rutin Nasional Tahun 1986-1990
(dalam milyaran rupiah)

Tahun	:	Jumlah Anggaran	:	Laju Pertumbuhan
1986	:	18 346,5	:	0,227067518
1987	:	19 892,4	:	0,084-261303
1988	:	21 438,2	:	0,077713096
1989	:	22 984,1	:	0,072109598
1990	:	24 521,9	:	0,067259540